

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS GINI RATIO KABUPATEN GORONTALO

Harijono Imbran¹

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

harijonoimbran@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and identify the level of income inequality using the Gini Ratio approach. The data sources used in this study are primary and secondary data obtained through observation and data collection reports both from Gorontalo District Statistic Center (BPS) and Gorontalo District Regional Development Planning Agency (BAPPEDA), such as Districts in Figures and Indicators of Welfare Results National Census. Data sourced from Bappeda and BPS in the form of per capita Gross Regional Domestic Product data on the basis of Constant Prices, and data on consumption per capita average. The results of the study show that the Gorontalo Regency Gini Ratio in the period 2012 - 2017 is in the moderate range (> 0.4) or at moderate or moderate levels.

Keywords: Identification, Analysis, Gini Ratio

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tingkat ketimpangan pendapatan dengan menggunakan pendekatan Rasio Gini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan pengumpulan data laporan baik dari Pusat Statistik Kabupaten (BPS) Gorontalo maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gorontalo, seperti Kabupaten dalam Angka dan Indikator Hasil Kesejahteraan Nasional. Sensus. Data bersumber dari Bappeda dan BPS berupa data Produk Domestik Regional Bruto per kapita berdasarkan Harga Konstan, dan data rata-rata konsumsi per kapita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Gini Kabupaten Gorontalo periode 2012 - 2017 berada pada kisaran sedang ($> 0,4$) atau berada pada tingkat sedang atau sedang.

Kata Kunci: Identifikasi, Analisis, Rasio Gini

Received: 10 Desember 2018

Revised: 11 Desember 2018

Accepted: 12 Desember 2018

PENDAHULUAN

Kinerja dan evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini menjadi pembahasan utama diberbagai wilayah di Indonesia. Kecenderungan tersebut bukan saja menjadi fenomena nasional, tetapi juga menjadi topik yang dibahas dunia

internasional. Pemikiran tersebut berangkat dari latar belakang pentingnya mensinkronkan antara pencapaian indicator - indikator perekonomian dengan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terhadap pencapaian hasil-hasil pembangunan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan

masyarakat diharapkan dapat memberi alternatif bagi setiap daerah untuk melakukan perubahan - perubahan kebijakan pembangunan, terutama perubahan kebijakan pembangunan ekonomi. Dengan perubahan kebijakan serta bertambahnya pilihan kebijakan diharapkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu daerah tidak saja mampu terlihat dari indikator-indikator makro perekonomian, namun dapat bersifat berkelanjutan serta inklusif. Hasil dari evaluasi kinerja pembangunan yang ada diharapkan mampu merekomendasikan perubahan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bukan tujuan akhir, namun adalah suatu alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk itu, setiap kreativitas kebijakan ekonomi diharapkan mampu untuk dapat mengusulkan perubahan paradigma yang lebih difokuskan hal-hal yang terkait kesejahteraan masyarakat dan distribusi guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kalangan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perekonomian, terutama masyarakat yang tingkat ekonominya golongan menengah ke bawah.

Jika menyimak kondisi makro ekonomi Kabupaten Gorontalo 6 tahun terakhir (2012 – 2017) menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik, sebagaimana

ditunjukkan oleh Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) selama 6 tahun terakhir (tahun 2012–2017) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2012 LPE Kabupaten Gorontalo mencapai di atas 7 % hingga tahun 2014 pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan masing-masing 6,31%, 6,62 dan 6,81% ,namun kinerja ekonomi daerah ini masih cukup baik karena masih tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 1.1.Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 -2017

Tahun	PDRB	Pertumbuhan
2012	5.594.792,60	7
2013	6.028.615,18	7
2014	6.496.912,67	7
2015	6.905.553,36	6
2016	7.362.609,08	6
2017	7.863.978,8	6

Sumber : Kabupaten Gorontalo Dalam Angka, 2018

Besaran perekonomian yang diindikasikan dengan nilai PDRB berdasarkan harga konstan juga mengalami perkembangan setiap tahunnya, walaupun prosentasi sejak 2015 mengalami penurunan cukup drastis dari 7,73 menjadi 6,31. Pada tahun 2016 menunjukkan kenaikan lagi hingga tahun 2017 mendekati 7 % atau 6,81%.

Selain itu inflasi merupakan salah satu data makro ekonomi yang mencerminkan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Seperti indikator ekonomi lainnya, inflasi dapat digunakan sebagai *early warning system* sehingga dapat dijadikan alat untuk memonitor secara dini anomali perubahan harga yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan oleh adanya konsumsi masyarakat yang berlebihan pada hari-hari raya agama, karena dampak kebijakan pemerintah atau lainnya. Monitoring harga biasanya dilakukan pada komoditi tertentu yang strategis seperti beras, minyak goreng, gula dan sebagainya. Kabupaten Gorontalo selama periode 2012-2016 mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Jika pada tahun 2015 tingkat inflasi cukup tinggi, yaitu mencapai 8,03%, pada tahun 2016 tingkat inflasi yang ada mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 3,21%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesejangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan

disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Salah satu masalah tingkat kesejahteraan di Kabupaten Gorontalo adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia pada umumnya tidak saja terjadi dikawasan-kawasan pedesaan atau pertanian (*rural*), tetapi juga menjadi masalah diperkotaan termasuk di Limboto sebagai ibukota kabupaten yang walaupun kemiskinannya di Kabupaten Gorontalo lebih terkonsentrasi pada masyarakat petani yang berada di pedesaan. Masalah-masalah kemiskinan salah satunya disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Meskipun perekonomian Kabupaten Gorontalo merupakan bagian perekonomian yang berkembang, akan tetapi persoalan distribusi pendapatan yang belum merata, dapat menimbulkan masalah yang lebih besar saat ini maupun dikemudian hari.

Untuk itu, jika ketimpangan ini dibiarkan berlarut-larut maka akan semakin memperparah keadaan perekonomian Kabupaten Gorontalo ke depan. Karena itu penelitian ini difokuskan membahas tentang identifikasi dan analisis *Gini Ratio* terhadap perubahan tingkat kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Gorontalo, sebagaimana melihat tingkat

distribusi pendapatan di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Gorontalo

Pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo dalam hal ini merupakan bagian dari proses perbaikan kualitas kesejahteraan ekonomipenduduk. Dimana, hal itu salah satunya dapat dimulai dengan memperbaiki tingkat pemerataan distribusi pendapatan diantara berbagai golongan ekonomi masyarakat. Pembangunan tingkat kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Gorontalo dapat dipandang sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat/warganya.

Pembangunan ekonomi pada satu sisi merupakan suatu proses yang bersifat multi dimensional yang mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi pemerintahan dan masyarakat, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan,serta pengentasan kemiskinan. Jadi, pada hakikatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan. Untuk itu, proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Gorontalo tidak terjadi sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai

pihak untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya penduduk Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini Bappeda Kabupaten Gorontalo sejak awal menyadari adanya kondisi eksisting maupun potensi adanya kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Gorontalo (maupun di daerah lainnya di Indonesia maupun di Provinsi Gorontalo), sehingga penting untuk selalu ditinjau/dievaluasi. Dari hasil evaluasi harapannya bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo yang cukup pesat namun fluktuatif saat ini pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya, atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Jika

diamati wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang ditopang oleh sumber daya alam khususnya sektor pertanian, perdagangan dan pembangunan ekonomi idealnya akan lebih cepat dibanding wilayah lainnya, akan tetapi ada juga wilayah yang hanya merupakan wilayah perumahan yang penduduknya relatif mapan, ada pula daerah yang secara potensi wilayahnya tinggi karena memiliki potensi pertanian produktif tetapi bisa jadi perekonomian masyarakatnya relatif rendah. Dengan dasar pemikiran tersebut maka perlu dilakukan kajian yang dapat melihat tingkat kesenjangan baik dilihat sisi ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan antar wilayah serta melakukan identifikasi kesejangan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Gorontalo.

Pertanyaan yang harus dikaji lebih mendalam adalah, apakah keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro di Kabupaten Gorontalo juga menyebabkan kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera? Apakah hasil pembangunan tersebut dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Kabupaten Gorontalo? Untuk mengkaji hal tersebut perlu diukur dengan melihat indikator-indikator yang menggambarkan kondisi secara umum permasalahan distribusi pendapatan yang ada. Alat atau indikator untuk mengukur

tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang umum digunakan adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia.

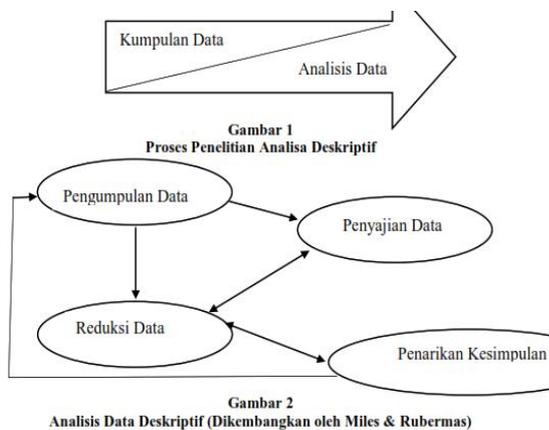
METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini subjek penelitian-nya adalah Kabupaten Gorontalo dan objek penelitian adalah distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Gorontalo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini mencatat, menuturkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis serta mendeskripsikan data dan informasi-informasi yang ada mengenai kenyataan yang terjadi mengenai distribusi pendapatan. Data utama yang digunakan adalah data sekunder, tentang distribusi pendapatan dengan menggunakan proxy pengeluaran/konsumsi rumah tangga sebagai pengganti data pendapatan masyarakat, karena data pendapatan sendiri di Indonesia masih belum tersedia. Ada dua macam teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam pengkajian ini, yaitu:

1. Data Primer, data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan

permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data primer ini ialah dengan cara survei.

2. Data Sekunder, Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPS, maupun instansi-instansi lainnya.



Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode analisis deskriptif. Metode analisis Pengukuran distribusi pendapatan biasanya didekati dengan menggunakan data pengeluaran, karena data pendapatan masyarakat dalam kenyataannya masih sangat sulit diperoleh. Dalam hal ini analisis tingkat distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga dari hasil Susenas dan Suseda. Bagaimana pun juga, distribusi pengeluaran tidak akan

sama dengan distribusi pendapatan. Namun cara ini dianggap sebagai pendekatan yang rasional untuk melihat trend dari distribusi pendapatan, walaupun harus di interperstasikan secara hati-hati. Melalui data Susenas dan Suseda, nilai pendapatan masyarakat Kabupaten Gorontalo diestimasi dari data konsumsi dengan pendekatan rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan. Data yang dikumpulkan adalah data konsumsi yang mencakup seluruh kebutuhan hidup masyarakat. Mengingat jumlah komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat sangat banyak dan beragam, maka dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu konsumsi kelompok makanan dan konsumsi kelompok bukan makanan.

A. Konsumsi makanan, meliputi :

1. Konsumsi padi-padian (Beras, jagung terigu, dan lain-lain)
2. Konsumsi umbi-umbian (ketela, kentang, sagu, dan lain-lain)
3. Konsumsi ikan/udang/cumi/kerang (segar dan diawetkan)
4. Konsumsi daging (sapi, kerbau, kambing, ayam dan lain-lain)
5. Konsumsi telur dan susu
6. Konsumsi sayur-sayuran (bayam, wortel, cabe, dan lain-lain)
7. Konsumsi kacang-kacangan
8. Konsumsi buah-buahan
9. Konsumsi Minyak dan lemak

10. Konsumsi bahan minuman (gula, teh, kopi, coklat, sirup, dan lain-lain)
11. Konsumsi bumbu-bumbuan (garam, kemiri, merica, terasi, kecap, dan lain-lain)
12. Konsumsi lainnya (mie instan/basah, bihun, makaroni, kerupuk dan lain-lain)
13. Konsumsi makanan dan minuman jadi (roti, biskuit, bakso, nasi rames, minuman beralkohol dan non alkohol)

B. Konsumsi non makanan, meliputi :

1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga (sewa/parkiran sewa, pemeliharaan/perbaikan ringan, rekening listrik/air/telepon, gas, minyak tanah, pulsa, dan lain-lain).
2. Aneka barang dan jasa (sabun/kosmetik, biaya kesehatan, pendidikan, transport, jasa lainnya).
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama (alat rumah tangga, elektronik dan lain-lain)
5. Pajak, pungutan dan asuransi.
Keperluan pesta dan upacara, tidak termasuk makanan. Untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Sedang untuk pengeluaran bukan makanan ditanyakan kondisi sebulan yang lalu dan satu tahun terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi

sendiri maupun dari pemberian. Desain kuesioner secara detail dibuat dengan harapan responden mampu mengingat nilai konsumsi yang dikeluarkannya.

Data yang digunakan untuk menghitung distribusi pendapatan dengan menggunakan perhitungan *Gini Ratio* adalah dengan menggunakan data jumlah pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Data pengeluaran/konsumsi rumah tangga di proxy untuk menggantikan data pendapatan penduduk, karena data pendapatan penduduk belum tersedia di Indonesia. Walaupun data pengeluaran penduduk tersebut nilainya tidak menggambarkan pendapatan riil penduduk akan tetapi secara empiris terbukti dapat memberikan gambaran pendapatan penduduk untuk dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Formula yang digunakan untuk menghitung Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah sebagai berikut:

$$GC = 1 - (X_i - X_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})$$

Dimana:

GC = Gini Coefficient (Gini Ratio)

X = Persentase Jumlah Penduduk Kumulatif ke-i

Yi = Persentase Jumlah Pendapatan Penduduk Kumulatif ke-i

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah, dilihat dari tahun 2012-2017 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo selalu mengalami kenaikan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2013-2017 berada diatas 6 % tiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya bisa menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Gorontalo ternyata berdampak positif terhadap peningkatan PDRB di Kabupaten Gorontalo, dari tahun 2012-2017 PDRB per kapita di Kabupaten Gorontalo rata-rata selalu mengalami peningkatan. PDRB perkapita sebagai proxy dari pendapatan perkapita masyarakat merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dan adanya aktivitas ekonomi, jadi pendapatan perkapita merupakan cerminan dari pendapatan penduduk disuatu wilayah tersebut. Berikut ini adalah perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Gorontalo tahun 2012-2017.

Tabel 3

PDRB Kabupaten Gorontalo Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 – 2017 (dalam rupiah)

Tahun	PDRB	Pertumbuhan
2012	5.594.792,60	7.74
2013	6.028.615,18	7.73
2014	6.496.912,67	7.77
2015	6.905.553,36	6.31
2016	7.362.609,08	6.62
2017	7.863.978,8	6,81

Sumber : Kabupaten Gorontalo Dalam Angka, 2018

Tabel 4

Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2017 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Penduduk	Pertumbuhan
2012	5.594.792,60	7.74
2013	6.028.615,18	7.73
2014	6.496.912,67	7.77
2015	6.905.553,36	6.31
2016	7.362.609,08	6.62
2017	7.863.978,8	6,81

Sumber : Kabupaten Gorontalo Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel 3 kita bisa melihat tingkat PDRB setiap tahun bertambah dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda atau fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 7,77 %, dan terendah terjadi pada tahun 2015 yang hanya 6,31%.

Kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gorontalo masih di dominasi oleh sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor industry

pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran.

Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Gorontalo

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Porsi pengeluaran masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi terhadap kebutuhan non makanan seperti: perumahan, barang dan jasa, pakaian, dan barang tahan lama (kendaraan, perhiasan dan sebagainya) biasanya lebih besar dibanding masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Pergeseran pola pengeluaran dari makanan ke non makanan terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini terlihat jelas pada kelompok penduduk yang tingkat

konsumsi makanan sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan, ditabung, ataupun investasi.

Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat, dimana distribusinya merupakan distribusi pendapatan masyarakat yang dapat dijadikan petunjuk tingkat pemerataan pendapatan masyarakat. Tabel 4 menggambarkan pola pengeluaran masyarakat Kabupaten Gorontalo terhadap makanan dan non makanan. Dalam tabel tersebut digambarkan persentase pengeluaran rumah tangga menurut jenis pengeluaran makanan dan jenis pengeluaran non makanan. Pada pengeluaran makanan dirinci menurut jenis komoditi makanan. Sedangkan pengeluaran non makanan dirinci menurut kelompok non makanan yaitu: perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian, barang tahan lama, pengeluaran untuk pajak dan asuransi, dan pengeluaran lainnya (untuk pesta dan lain sebagainya).

Tabel 5
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Gorontalo Menurut Kelompok Barang
(Makanan dan Bukan Makanan)

Jenis Komoditi	Prosentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Per Bulan					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Makan						
1. Padi-Padian	44.095	45.084	44.262	58.936	65.157	69.107
2. Umbi-Umbian	1.993	1.629	2.050	2.150	2.176	2.471
3. Ikan/Cuma/Udah/Kerang	32.816	36.98	40.349	41.133	43.033	45.131
4. Daging	4.596	4.629	8.484	6.523	8.271	8.641
5. Telur/Susu	8.985	9.993	16.837	13.626	15.789	18.035
6. Sayuran	18.355	23.267	24.209	19.578	29.132	33.321
7. Kacang-Kacangan	3.198	3.918	4.325	3.371	5.278	6.365
8. Buah-Buahan	6.697	7.753	11.274	11.267	12.977	16.071
9. Minyak Lemak	10.164	11.176	12.122	11.104	10.641	12.043
10. Bahan Minuman	8.332	8.801	10.168	9.943	11.587	13.181
11. Bumbu-Bumbuan	4.692	6.203	6.494	6.597	8.299	9.309
12. Konsumsi Lain	3.054	3.207	4.187	4.572	4.696	5.020
13. Makanan & Minuman Jadi	46.993	57.655	80.520	74.098	87.384	93.408
	27.960	30.838	37.139	40.235	46.580	52.176
Total Makanan	221.882	251.132	302.419	304.133	351.000	384.729
B. Bukan Makanan						
1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	63.532	73.322	86.254	133.597	163.034	164.540
2. Aneka Barang dan jasa	78.114	81.311	110.634	71.495	90.069	91.160
3. Pakaian, alas kaki, penutup kepala	17.243	19.141	24.658	19.233	25.060	26.161
4. Barang tahan lama	35.026	64.036	34.014	48.297	70.548	71.112
5. Pajak, pungutan, asuransi	3.138	5.292	7,20	9.135	9.231	9.605
	2.417	6.596	5,709	10.769	13.720	12.020
Total Non Makan	199.470	249.698	168.469	292.525	342.662	374.598
Pengeluaran Total	421.352	509.828	570.887	596.658	693.662	758.877

Sumber : BPS, 2017

Tabel 6
Distribusi Prosentase Konsumsi
Perkapita Kabupaten Gorontalo Tahun
2012 -2017

Tahun	Makanan	Non Makanan
2012	52,66	47,34
2013	50,14	49,86
2014	64,22	35,78
2015	50,97	49,03
2016	50,60	49,40
2017	50,67	49,33

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 6 diatas kita bisa melihat, proporsi pengeluaran rumah tangga rata-rata perbulan yang dikeluarkan oleh rumah tangga di Kabupaten Gorontalo. Pengeluaran rumah tangga Kabupaten Gorontalo dari tahun 2012-2017 rata-rata masih didominasi oleh pengeluaran rumah tangga untuk bahan makanan. Dari data ini

kita bisa melihat perkembangan pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Gorontalo masih belum mengalami pergeseran kebutuhan makanan ke non makanan, hal ini menunjukkan bahwa indikator bahwa konsumsi rumah tangga di Kabupaten Gorontalo masih terfokus pada kebutuhan pokok, dengan demikian masyarakat Kabupaten Gorontalo masih belum sejahtera secara umum jika diukur dari kelompok pengeluarannya.

Bila dilihat menurut komoditi makanan, pengeluaran terbesar penduduk Kabupaten Gorontalo yang paling banyak adalah untuk pengeluaran padi-padian, makanan jadi, ikan/cumi/kerang, tembakau dan sirih, sayuran, dan minyak lemak. Sedangkan pengeluaran terkecil terdapat pada pengeluaran ubi-ubian, kacang-kacangan dan konsumsi lainnya. Menurut komoditas bukan makanan, pengeluaran yang paling tinggi terdapat di perumahan dan aneka barang dan jasa serta barang yang tahan lama. Sedangkan pengeluaran terkecil terdapat di pajak dan asuransi. Apabila kita cermati pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Gorontalo terbanyak ternyata berada di golongan makanan, hal ini tidak terlepas dari julukan Kabupaten sebagai daerah berbasis pertanian, Bila melihat nilai persentasenya, pengeluaran makanan yang dilakukan penduduk

Kabupaten Gorontalo rata-rata diatas 52,44% tiap tahunnya, sedangkan untuk non makanan rata-rata sebesar 4,56%. Akan tetapi banyaknya pengeluaran non makanan yang dilakukan oleh penduduk di Kabupaten Gorontalo tidak mencerminkan seluruh masyarakat di Kabupaten Gorontalo memiliki tingkat kesejahteraan yang sama diukur dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, hal ini dikarenakan hanya masyarakat golongan menengah keatas saja yang melakukan pengeluaran non makanan yang lebih banyak, sedangkan masyarakat golongan bawah hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan makanannya saja.

Jika kita lihat berdasarkan tabel 6 diatas kita dapat mengetahui bahwa rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Gorontalo pada tahun 2016 secara keseluruhan sebesar Rp 4,562,720.16. Akan tetapi bila dibreakdown ke kecamatan masih belum dapat dijelaskan mengingat data PDRB Kecamatan belum tersedia di Kabupaten Gorontalo.

Kesenjangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Gorontalo

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo 2005-2025 telah mengamanatkan bahwa inti dari pelaksanaan pembangunan

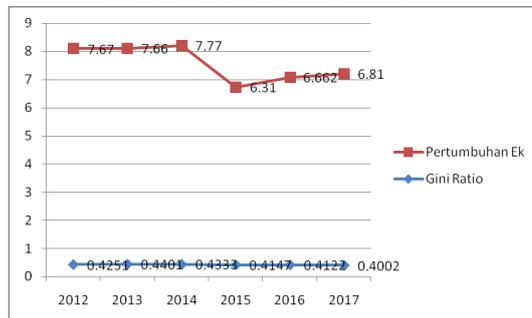
adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam arti luas (*human welfare*). Aspek ini bisa melingkupi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga pemerataan distribusi pendapatan. Tidak bisa dipungkiri jika dalam suatu daerah ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat itu semakin tinggi, maka hal ini dapat menyebabkan adanya kecemburuan sosial dan bisa terjadi tindakan kriminal dalam suatu masyarakat.

Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan ketika menentukan karakteristik penduduk miskin. Hal yang penting untuk mendapat perhatian ialah tingkat pendapatan dan juga distribusinya di antara anggota rumah tangga dan diantara berbagai kelompok sosial. Meskipun demikian, dalam prakteknya indikator pendapatan sering menghadirkan masalah-masalah tertentu. Pendapatan sulit didefinisikan, karena pendapatan mencakup banyak komponen, namun hanya beberapa komponen yang berkaitan dengan moneter (misalnya, rumah tangga pertanian mengkonsumsi sebagian besar produksi sendiri). Kedua, individu cenderung membuat pernyataan yang keliru tentang tingkat pendapatannya, yang umumnya di bawah perkiraan (*underestimated*). Dengan keterbatasan ini dan berdasarkan kenyataan bahwa nilai

tabungan rendah, sering terjadi kecenderungan untuk menggunakan total pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan untuk pendapatan yang dibelanjakan.

Adanya ketimpangan yang besar antara si kaya dan si miskin dapat mengindikasikan bahwa pembangunan di daerah tersebut masih belum berhasil karena hanya dinikmati oleh sebagian orang saja, terutama orang kaya. Sedangkan orang yang miskin akan semakin menderita karena adanya ketimpangan tersebut. Gini Ratio merupakan suatu ukuran yang biasanya digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, walaupun masih ada ukuran-ukuran untuk mengetahui ketimpangan lainnya, akan tetapi Gini Ratio yang biasanya digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat. Berikut ini adalah perbandingan nilai gini rasio dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo.

Gambar 3
Perkembangan Laju Pertumbuhan
Ekonomi dan Gini Ratio Kabupaten
Gorontalo tahun 2012-2017



Berdasarkan gambar 3 dapat kita ketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012-2014 selalu mengalami kenaikan, namun pada tahun 2015 turun drastic hingga 6,31 % dan pada tahun 2016-2017, mengalami kenaikan lagi walaupun masih dibawah 7%. Akan tetapi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti juga dengan besarnya nilai gini ratio di Kabupaten Gorontalo. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tiap tahunnya bisa menyebabkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat semakin tinggi juga, hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gunawan mengenai Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Krisis Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia dari tahun 1960-1999. Selain itu ketimpangan pendapatan juga dapat menyebabkan bertambahnya penduduk miskin, dimana golongan orang-orang kaya akan semakin kaya dan

golongan orang-orang miskin akan semakin miskin.

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gorontalo bisa terjadi dikarenakan belum adanya pemerataan lapangan kerja serta rendahnya daya beli masyarakat. Pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo belum terkonsentrasi dengan baik. Kawasan-kawasan yang diharapkan tumbuh cepat seperti Kecamatan Telaga yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo yang diharapkan sebagai akibat dari *trickle down effect* dari kota Gorontalo justru tidak terjadi secara signifikan. Kecamatan Limboto yang merupakan pusat pemerintahan tidak mampu menjadi kawasan kota yang cepat tumbuh, padahal potensi untuk menjadi kota cukup menunjang mengingat konsentrasi penduduk Kabupaten Gorontalo justru berada di Kecamatan Limboto. Wilayah Barat Kabupaten Gorontalo yang dikenal dengan Bilyohuto grup (kawasan yang dirancang untuk mendukung sektor industry dengan bahan baku hasil-hasil pertanian belum mampu tumbuh sesuai dengan yang rencanakan oleh pemerintah daerah. Demikian pula dengan kecamatan Tibawa yang rancang untuk menjadi wilayah perdagangan karena wilayah merupakan poros dari dan menuju daerah-daerah di Sulawesi Tengah dan

Manado Sulawesi Utara. Belum berkembang sesuai yang diharapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dari penelitian Indeks Gini Ratio di Kota Bandung ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo yang rata-rata diatas 7% pertahun, pada tahun 2012-2014, namun sejak 2015 – 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo menurun dan hanya rata di atas 6%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo itu sudah tercapai, hal ini bisa dilihat dari distribusi pendapatan yang nilainya mencapai 0,4 yang berarti memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang sedang (Moderat).
2. Indeks Gini Ratio Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2012 – 2014 berada di angka lebih dari 0,4, angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki tingkat ketimpangan yang relatif sedang. Akan tetapi angka ini merupakan peringatan dini untuk Kabupaten Gorontalo agar bisa mengantisipasi kesenjangan distribusi pendapatan

yang ada di kalangan masyarakatnya. Angka kesenjangan yang relatif tinggi dapat menyebabkan kanterjadinya kecemburuan - kecemburuan sosial diantara masyarakat, sehingga bisa menyebabkan adanya konflik sosial serta tindakantindakan kriminal lainnya.

3. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Gorontalo rata-rata mengalami kenaikan seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo yang rata-rata diatas 6–7% pertahun.
4. Angka gini ratio di Kabupaten Gorontalo berdasarkan data terbaru hasil survey menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gorontalo selalu tidak menentu setiap tahunnya, erflukuasi di atas 0,4 hingga tahun 2017, yang walaupun hal ini masih dikategorikan rendah (moderat) ketimpangan yang terjadi.

Saran

Memperhatikan analisis data dan kesimpulan maka saran dari kajian ini adalah:

1. Perlu dilakukan penyesuaian tingkat upah nominal sejalan dengan indikator tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga porsi pengeluaran makanan dan non makanan

- masyarakat dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakat serta perubahan tingkat harga komoditas di Kota Bandung.
2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo diharapkan dapat mengoptimalkan kestabilan harga-harga komoditas bahan makanan dan non makanan sehingga perubahan tingkat pendapatan nominal masyarakat dapat sejalan dengan perubahan daya beli masyarakat terhadap komoditas bahan makanan dan non makanan di Kabupaten Gorontalo.
 3. Sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Gorontalo mengarahkan APBD nya untuk tujuan-tujuan perbaikan dan peningkatn produktivitas sektr-sektor unggulan yang ada.
 4. Perbaikan distribusi pendapatan dapat dilakukan/sejalan dengan program-program pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, sehingga melalui pengurangan pengangguran dan pengurangan tingkat kemiskinan porsi pengeluaran/belanja makanan dan non makanan penduduk dapat lebih merata sejalan dengan semakin turunnya jumlah peduduk miskin dan jumlah pengangguran.
 5. Oleh karena struktur perekonomian di Kabupaten Gorontalo masih didominasi oleh sektor-sektor tersier atau sektor jasa, maka pengembangan sektor-sektor tersebut harus optimal (infrastruktur, regulasi, SDM dan lain-lain), sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dapat sejalan dengan perubahan tingkat pendapatan masyarakat atau tenaga kerja di sektor-sektor tersebut.
 6. Program pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait pengembangan kawasan-kawasan ekonomi jangan dilakukan setengah-setengah, dan seharusnya terimplementasi melalui RPJMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R, 2008. *Ekonomi Archipelago*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Amir, Hidayat, & Riphath, Singgih, 2005. *Analisis Sektor Unggulan untuk Evaluasi*
- Arsyad, Lincolin, 2009. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE, Yogyakarta.
- Aswandi, H, & Kuncoro, M, 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi*

- Azis, Iwan J, 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta
- Glasson, John, 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Jhingan, M. L, 2009. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terjemahan D.Guritno. Rajawali, Jakarta.
- Kabupaten Dalam Angka, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gorontalo 2012-2017*.
- Marhayanie, 2003..Identifikasi Sektor Ekonomi Potensial dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan..Tesis. Program Pascasarjana USU, Medan.
- Mukhyi, Muhammad, Abdul. Analisis Peranan Subsektor Pertanian dan Sektor Unggulan terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Propinsi Jawa Barat: Pendekatan Analisis IRIO, Fakultas Ekonomi Gunadarma Jakarta
- <http://ejournal.gunadarma.ac.id/files/MA%20Mukhyi.pdf>, diakses pada tanggal 9 Februari 2009.
- Nazir, 2005, Metode Penelitian, Galia Indonesia, Jakarta
- Provinsi Dalam Angka, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo 2006-2013*
- Provinsi Dalam Angka, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo* .
- Pusat Statistik, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gorontalo 2012- 2017*.
- Rachbini, Didik J, 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Richardson, Harry W, 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2004. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Gunung Agung, Jakarta.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang.
- Supangkat tahun 2002, Sektor Pembentuk PDRB..Tesis. Program Pascasarjana USU, Medan.
- Sukirno, Sadono, 2005. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan dasar Kebijakan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian, Erlangga, Jakarta

- Tarigan, Robinson, 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Edisi Keenam, Jakarta.